



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 2, No. 2, Tahun 2026

doi.org/10.63822/qc84nx29

Hal. 531-546

Available online at <https://indojournal.com/index.php/jti/index>

Rekonstruksi Epistemologi Spiritual Islam di Era *Artificial Intelligence*: Integrasi Teologi, Filsafat, dan Tasawuf sebagai Paradigma Pengetahuan Baru

Aslam Saad¹, Ali Hasan Siswanto²

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Indonesia¹

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Indonesia²

*Email Korespodensi: alihasan_siswanto@uinkhas.ac.id

Diterima: 17-07-2026 | Disetujui: 23-07-2026 | Diterbitkan: 25-07-2026

ABSTRACT

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has fundamentally transformed the landscape of knowledge production, dissemination, and validation, including within the field of Islamic Studies. This transformation has given rise to a crisis of spiritual epistemology, characterized by the increasing fragmentation of the relationship among theology (kalām), Islamic philosophy (falsafah), and Sufism (taṣawwuf) as the three principal pillars of the Islamic intellectual tradition. At the same time, the dominance of the positivist paradigm in contemporary academic scholarship has increasingly marginalized revelation, intuition, and spiritual experience as legitimate sources of knowledge. Although research on AI in Islamic Studies has expanded significantly, it has predominantly focused on issues of ethics, Islamic law, education, and the digitalization of religious services. Existing studies have yet to adequately examine the implications of AI for the reconstruction of Islamic epistemology, nor have they proposed a conceptual model that integrates revelation, reason, spiritual experience, and artificial intelligence within a unified epistemic framework. Addressing this gap, this article adopts an integrative Islamic epistemological approach by synthesizing perspectives from theology, Islamic philosophy, Sufism, and the philosophy of technology. This study employs a qualitative conceptual library research design through a critical literature review, philosophical analysis, and conceptual synthesis of both classical and contemporary scholarship. The article argues that AI should be understood as an epistemic instrument that extends human cognitive capacities rather than as an epistemic authority capable of replacing revelation, reason, and spiritual experience. As its principal theoretical contribution, this study proposes the Integrated Spiritual Epistemology Framework (ISEF) as a new epistemological paradigm that reconstructs the relationship among revelation, reason, maʿrifah (spiritual knowledge), and artificial intelligence within the framework of contemporary Islamic knowledge. This framework is expected to enrich the theory of Islamic epistemology, strengthen the dialogue between Islamic Studies and the philosophy of technology, and open new avenues of research on the authority of religious knowledge in the age of artificial intelligence.

Keywords: Artificial Intelligence; Islamic Epistemology; Theology; Islamic Philosophy; Sufism; Spiritual Epistemology; Integrated Spiritual Epistemology Framework (ISEF)

ABSTRAK

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah secara fundamental lanskap produksi, distribusi, dan validasi pengetahuan, termasuk dalam bidang Studi Islam. Transformasi ini memunculkan krisis epistemologi

spiritual yang ditandai oleh semakin terfragmentasinya relasi antara teologi (kalām), filsafat Islam (falsafah), dan tasawuf sebagai tiga pilar utama tradisi intelektual Islam. Pada saat yang sama, dominasi paradigma positivistik dalam kajian akademik cenderung memarginalkan dimensi wahyu, intuisi, dan pengalaman spiritual sebagai sumber pengetahuan yang sah. Meskipun penelitian mengenai AI dalam Studi Islam berkembang pesat, sebagian besar masih berfokus pada aspek etika, hukum Islam, pendidikan, dan digitalisasi layanan keagamaan. Penelitian tersebut belum secara memadai membahas implikasi AI terhadap rekonstruksi epistemologi Islam serta belum menawarkan model konseptual yang mengintegrasikan wahyu, rasio, pengalaman spiritual, dan kecerdasan buatan dalam satu kerangka epistemik. Berangkat dari kesenjangan tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan epistemologi Islam integratif dengan memadukan perspektif teologi, filsafat, tasawuf, dan filsafat teknologi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan desain konseptual-kualitatif melalui critical literature review, analisis filosofis, dan sintesis konseptual terhadap literatur klasik maupun kontemporer. Artikel ini berargumen bahwa AI seharusnya diposisikan sebagai instrumen epistemik yang memperluas kapasitas kognitif manusia, bukan sebagai otoritas pengetahuan yang menggantikan wahyu, akal, dan pengalaman spiritual. Sebagai kontribusi ilmiah, artikel ini mengajukan Integrated Spiritual Epistemology Framework (ISEF) sebagai paradigma epistemologi baru yang merekonstruksi hubungan antara wahyu, rasio, ma'rifah, dan AI dalam kerangka pengetahuan Islam kontemporer. Kerangka ini diharapkan memperkaya teori epistemologi Islam, memperluas dialog antara Studi Islam dan filsafat teknologi, serta membuka agenda penelitian baru mengenai otoritas pengetahuan keagamaan di era kecerdasan buatan.

Katakunci: Artificial Intelligence; Epistemologi Islam; Teologi; Filsafat Islam; Tasawuf; Epistemologi Spiritual; Integrated Spiritual Epistemology Framework (ISEF) .

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Siswanto, A. H., & Saad , A. (2026). Rekonstruksi Epistemologi Spiritual Islam di Era Artificial Intelligence: Integrasi Teologi, Filsafat, dan Tasawuf sebagai Paradigma Pengetahuan Baru. *Jurnal Teologi Islam*, 2(2), 531-546. <https://doi.org/10.63822/qc84nx29>

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, kemajuan pesat dalam kecerdasan buatan (artificial intelligence, AI) telah merombak lanskap produksi pengetahuan di berbagai disiplin ilmu, termasuk studi Islam, teologi, filsafat, dan tasawuf. AI tidak lagi sekadar alat bantu teknis; ia muncul sebagai aktor baru yang mempengaruhi bagaimana data dikumpulkan, pola diidentifikasi, dan kesimpulan ditarik, sebuah pergeseran yang menuntut kita merefleksikan kembali otoritas epistemik tradisional. Fenomena ini dapat dilacak dalam transformasi institusional dan praksis intelektual yang lebih luas: algoritma pembelajaran mesin menggerakkan rekomendasi literatur, otomatisasi analisis teks memengaruhi interpretasi naskah keagamaan, dan sistem prediktif memengaruhi agenda penelitian serta prioritas pendanaan. Dampaknya bersifat ganda: di satu sisi, AI meningkatkan kapasitas empiris dan hermeneutik melalui skala dan kecepatan analisis; di sisi lain, ia memunculkan ketegangan antara otoritas manusia yang berakar pada tradisi hermeneutik Islam dan otoritas algoritmik yang berlandaskan statistik serta optimisasi fungsi objektif. Perdebatan ini bukan semata soal teknologi, melainkan perubahan kondisi sosial-historis yang mengubah agen, sumber, dan mekanisme validasi pengetahuan—sebuah realitas yang menuntut kerangka epistemologis baru yang sensitif terhadap dimensi spiritual, normatif, dan metodologis dalam studi Islam. Untuk pemahaman fenomena ini, para peneliti telah berupaya mengkaji konsekuensi epistemik AI dalam bidang agama dan ilmu sosial, tetapi diskursus tersebut masih didominasi oleh narasi teknologi-etik dan regulasi, sehingga dimensi spiritual dan integratif dari epistemologi Islam relatif kurang mendapat perhatian.

Kajian mutakhir tentang AI dan agama menonjolkan tiga garis besar: kajian etika dan regulasi AI, implikasi hukum (fiqh) terhadap praktik dan kebijakan berbasis AI, serta kajian fenomenologis digital religion yang menyoroti praktik keagamaan di ruang maya. Literatur etika menyoroti masalah bias, transparansi, dan tanggung jawab algoritmik serta usulan prinsip-prinsip etika universal dan kontekstual. Kajian fiqh terhadap AI mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam merespons entitas digital, misalnya, validitas akad otomatis, tanggung jawab moral AI, dan implikasi pengambilan keputusan otomatis dalam hukum Islam. Literatur digital religion dan studi praktik keagamaan di ranah siber memperkaya pemahaman tentang bagaimana umat memediasi pengalaman religius melalui platform digital dan bagaimana otoritas ritual mengalami hibridasi. Namun, tinjauan state-of-the-art menunjukkan keterbatasan penting: studi-studi tersebut cenderung mempertahankan pembagian disiplin tradisional (etika, hukum, sosiologi agama) tanpa secara konseptual menginterogasi fondasi epistemik yang memungkinkan fragmentasi ini. Kajian epistemologi keagamaan yang menghubungkan wahyu (textual revelation), rasio (human reason), pengalaman spiritual (mystical experience), dan teknologi kognitif (AI) masih sporadis dan belum terintegrasi menjadi suatu paradigma koheren. Beberapa upaya awal mengusulkan model interaksi manusia-mesin yang normatif atau hermeneutic, namun jarang yang menempatkan dimensi tasawuf (pengalaman batin, latihan spiritual, dan otoritas transmisional) sebagai komponen epistemik pusat yang dapat berinteraksi secara produktif dengan algoritma dan praktik data-driven.

Dari tinjauan tersebut muncul celah teoritis dan metodologis yang sistemik. Pertama, dominasi epistemologi positivistik dalam studi mengenai AI menegaskan nilai empiris dan kuantitatif sebagai satu-satunya tolok ukur validitas, sehingga mengabaikan epistemik non-empiris seperti wahyu dan pengalaman spiritual yang merupakan inti tradisi keilmuan Islam. Kedua, fragmentasi antara teologi, filsafat, dan

tasawuf memperlemah kemampuan disiplin untuk merespons tantangan ontologis dan etis AI secara holistik; teologi cenderung membahas doktrin, filsafat menelaah rasionalitas, sementara tasawuf berfokus pada pengalaman batin, ketiganya jarang diorkestrasikan dalam kerangka epistemik terpadu. Ketiga, literatur yang ada lebih banyak berorientasi pada implikasi praktis (ethics, law, pedagogy) dan kurang pada rekonstruksi epistemologi yang mampu menyintesis sumber-sumber Islam (wahyu, rasio, ijma'/tradisi) dengan kapabilitas kognitif dan heuristik AI. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang mendesak adalah: mengapa epistemologi Islam mengalami fragmentasi di era AI; apa kelemahan struktural paradigma epistemologi Islam kontemporer dalam menghadapi otoritas algoritmik; dan bagaimana merekonstruksi epistemologi spiritual Islam yang integratif sehingga mampu menempatkan wahyu, rasio, pengalaman spiritual, dan AI dalam relasi epistemik yang produktif? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut langkah analitis ganda: diagnosis historis-kritis terhadap proses fragmentasi dan konstruksi normatif terhadap paradigma alternatif yang mempertimbangkan keunikan sumber-sumber Islam sekaligus realitas teknologi kontemporer.

Artikel ini mengajukan tesis utama bahwa respons produktif terhadap tantangan AI dalam studi Islam memerlukan rekonstruksi epistemologis yang mengintegrasikan empat sumber pengetahuan: wahyu, rasio, pengalaman spiritual (tasawuf), dan kapasitas kognitif-teknis AI, sebuah kerangka yang saya sebut Integrated Spiritual Epistemology Framework (ISEF). ISEF bukan sekadar kompilasi sumber-sumber tradisional, melainkan paradigma teoritis yang mengartikulasikan mekanisme interaksi, kriteria validitas, dan prosedur verifikasi yang menghormati otoritas transenden wahyu sekaligus memanfaatkan kapabilitas inferensial AI secara kritis dan normatif. Secara teoretis, kontribusi ISEF meliputi: (a) memperluas peta epistemik studi Islam dengan menempatkan pengalaman spiritual sebagai sumber validitas yang dapat diajukan dalam dialog metodologis dengan data-driven knowledge; (b) mengembangkan prinsip-prinsip integratif yang menjembatani otoritas hermeneutik tradisional dan otoritas algoritmik melalui kriteria evaluatif bersama (misalnya: konsistensi hermeneutik, koherensi praktis, transparansi algoritmik, dan sensitivitas etis-spiritual); dan (c) menawarkan langkah metodologis untuk implementasi ISEF dalam penelitian empiris dan teks, misalnya penggunaan metode mixed hermeneutics-AI untuk analisis naskah dan praktik spiritual secara kontekstual. Kebaruan yang ditawarkan artikel ini menempati dua lapis: pertama, inovasi konseptual dengan mengusulkan ISEF sebagai paradigma epistemik baru dalam studi Islam; kedua, relevansi praktis dengan menyajikan kerangka yang dapat digunakan oleh peneliti, pembuat kebijakan, dan komunitas keagamaan untuk menavigasi interaksi manusia-AI tanpa mereduksi dimensi spiritual. Dengan demikian, artikel ini tidak sekadar mengkritik fragmentasi epistemik, melainkan menghadirkan konstruksi teoritis dan peta penelitian yang konkret untuk merekonsiliasi tradisi keilmuan Islam dengan tuntutan kognitif dan etis era AI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis **penelitian kepustakaan (library research)** yang berorientasi pada pengembangan teori (theory-building research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan untuk menguji hipotesis melalui data empiris, melainkan merekonstruksi paradigma epistemologi Islam yang relevan dengan perkembangan Artificial Intelligence

(AI). Dalam tradisi penelitian filsafat dan studi agama, penelitian kepustakaan merupakan metode yang tepat untuk mengkaji persoalan konseptual, ontologis, epistemologis, dan normatif melalui analisis kritis terhadap literatur primer maupun sekunder. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan teks, gagasan, dan argumentasi ilmiah sebagai sumber utama data penelitian untuk membangun sintesis konseptual mengenai hubungan antara wahyu, rasio, pengalaman spiritual, dan AI. Pendekatan ini sejalan dengan karakter penelitian filsafat yang menekankan argumentasi rasional, refleksi kritis, dan konstruksi konseptual dibandingkan pengumpulan data lapangan.

Sumber data penelitian terdiri atas dua kategori. Pertama, **literatur primer**, yaitu karya-karya klasik dalam tradisi intelektual Islam yang membahas epistemologi, teologi (*kalām*), filsafat Islam (*falsafah*), dan tasawuf, termasuk pemikiran al-Ghazālī, Ibn Sīnā, Suhrawardī, Ibn 'Arabī, dan Mullā Ṣadrā mengenai relasi wahyu, akal, intuisi, dan *ma'rifah*. Kedua, **literatur sekunder**, berupa artikel-artikel ilmiah bereputasi internasional yang membahas filsafat teknologi, Artificial Intelligence, etika AI, epistemologi, digital religion, serta perkembangan studi Islam kontemporer yang terindeks Scopus dan Web of Science. Penggunaan kedua jenis sumber tersebut memungkinkan penelitian membangun dialog antara khazanah intelektual Islam klasik dengan perkembangan teori kontemporer mengenai AI dan filsafat teknologi sehingga menghasilkan analisis yang bersifat interdisipliner.

Pengumpulan data dilakukan melalui **critical literature review** secara sistematis. Literatur dipilih berdasarkan relevansi substansi terhadap tema penelitian, kualitas akademik sumber, tingkat sitasi, serta kontribusinya terhadap pengembangan teori epistemologi Islam maupun filsafat AI. Tahapan kajian meliputi identifikasi literatur, seleksi berdasarkan kriteria inklusi, pembacaan mendalam (*close reading*), kategorisasi tema, serta pemetaan hubungan konseptual antar gagasan. Berbeda dengan *systematic literature review* yang bertujuan melakukan sintesis empiris terhadap hasil penelitian, *critical literature review* dalam penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, asumsi filosofis, serta implikasi epistemologis dari berbagai teori yang berkembang mengenai AI, agama, dan produksi pengetahuan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan, yaitu **analisis filosofis (philosophical analysis), analisis komparatif, dan sintesis konseptual**. Analisis filosofis digunakan untuk mengkaji asumsi-asumsi ontologis dan epistemologis yang melandasi perkembangan AI maupun tradisi epistemologi Islam. Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan paradigma epistemologi positivistik modern dengan epistemologi Islam klasik yang bertumpu pada integrasi wahyu, rasio, dan pengalaman spiritual. Tahap terakhir berupa sintesis konseptual bertujuan mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut ke dalam kerangka teoritis yang lebih komprehensif sehingga mampu menjelaskan posisi AI dalam struktur pengetahuan Islam kontemporer tanpa menghilangkan otoritas wahyu maupun dimensi spiritual.

Untuk menjaga validitas konseptual, penelitian menerapkan **triangulasi teori (theoretical triangulation)** melalui dialog antara filsafat ilmu, filsafat teknologi, teologi Islam, filsafat Islam, dan tasawuf. Selain itu, proses interpretasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan hermeneutik-filosofis sehingga setiap konsep dianalisis berdasarkan konteks historis, makna konseptual, serta relevansinya terhadap perkembangan AI. Strategi ini memungkinkan penelitian menghindari reduksionisme disipliner sekaligus menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif mengenai transformasi epistemologi Islam di era digital. Validitas argumentasi juga diperkuat melalui proses perbandingan silang terhadap berbagai

pandangan akademik yang berkembang dalam literatur internasional mengenai epistemologi, AI ethics, digital religion, dan philosophy of technology.

Berdasarkan keseluruhan tahapan tersebut, penelitian ini menghasilkan sebuah model konseptual yang dinamakan **Integrated Spiritual Epistemology Framework (ISEF)**. Kerangka ini merupakan hasil sintesis filosofis yang merekonstruksi hubungan antara wahyu (*wahy*), rasio (*'aql*), pengalaman spiritual (*ma'rifah*), dan Artificial Intelligence sebagai empat komponen utama dalam sistem pengetahuan Islam kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap perkembangan AI dalam Studi Islam, tetapi juga menawarkan kontribusi teoritis berupa paradigma epistemologi baru yang dapat menjadi landasan konseptual bagi penelitian-penelitian lanjutan mengenai hubungan antara agama, teknologi, dan produksi pengetahuan pada era kecerdasan buatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Krisis Epistemologi Spiritual dalam Studi Islam Kontemporer

Pembahasan ini dimulai dengan pengaturan konseptual yang menempatkan epistemologi spiritual Islam (yang merujuk pada wahyu, rasio, pengalaman ma'rifah/tasawuf, dan tradisi hermeneutik) berhadapan dengan hegemoni epistemik positivistik modern. Modernitas intelektual mengangkat scientification of religion, yaitu agenda yang menilai ilmu agama melalui ukuran-ukuran empiris, kuantitatif, dan procedural, sehingga hanya bentuk pengetahuan yang dapat dioperasionalisasikan, diukur, dan direplikasi yang diposisikan sebagai *ilmiah*. Fenomena ini bukan sekadar preferensi metodologis; ia merupakan reposisi otoritas epistemik yang meredefinisi sumber-sumber validitas: verifikasi empiris dan konsistensi statistik menggantikan otoritas tekstual transmisi, intelektual-rasionalitas normatif, serta pengalaman mistik yang bersifat interior dan transformasional. Dalam konteks ini, ma'rifah (pengetahuan spiritual yang teruji melalui pengalaman batin dan latihan tasawuf) menghadapi marginalisasi sistemik karena ia tidak mudah diubah menjadi data besar (big data), metrik interoperabel, atau model-model prediktif yang menjadi syarat validitas dalam rezim penelitian kontemporer. Perdebatan teoretis mengenai batas-batas ilmu tampil pada literatur filsafat ilmu dan studi agama kontemporer: beberapa penulis menegaskan pentingnya perluasan definisi sains untuk memasukkan pluralitas epistemik, sementara lainnya memperingatkan bahaya relativisme jika semua bentuk pengetahuan diberi legitimasi epistemik setara tanpa kriteria diferensial. Dalam konteks studi Islam, ketegangan ini konkret karena tradisi intelektual Islam memiliki epistemologi komposit—wahyu (naql), akal (aql), dan pengalaman spiritual (khawāṭir, kashf)—yang menuntut kriteria validitas berbeda dari positivisme sekuler.

Secara tekstual dan historis, doktrin epistemik Islam klasik mengartikulasikan relasi komprehensif antara wahyu, rasio, dan pengalaman spiritual. Kitab-karangan kalam, ushul fiqh, dan karya-karya sufi (mis. al-Ghazālī, Ibn Sīnā, Ibn 'Arabī) menampilkan model epistemik di mana kebenaran dapat ditemukan melalui pembacaan tekstual yang sahih, argumentasi rasional, dan verifikasi interior melalui latihan spiritual. Al-Ghazālī dalam Tahāfut al-Falāsifah membedakan otoritas rasio yang terbatas dan menegaskan kebutuhan pengalaman spiritual yang meneguhkan kebenaran religius pada ranah yang melampaui deduksi rasional semata; Ibn 'Arabī kemudian memperluas ini dengan teori wahdat al-

wujūd yang menempatkan pengalaman kashf sebagai sumber pengetahuan teologis yang sah. Namun sejak era kolonial dan modernisasi, institusionalisasi ilmu di kampus-kampus Muslim serta adopsi metodologi Barat menggeser fokus ke studi tekstual-historis dan empiris yang dapat diukur, sebuah pergeseran yang selaras dengan proses sekularisasi birokratik dan kebutuhan negara-modern untuk administrasi, legitimasi dan regulasi pengetahuan agama. Data historis tentang kurikulum universitas Islam modern, serta analisis bibliometrik terhadap publikasi di jurnal-jurnal studi Islam, menunjukkan dominasi pendekatan sejarah, sosiologi, dan kajian teks kritis dibandingkan kajian-tinjauan terhadap pengalaman sufistik secara metodis. Fakta empiris ini menegaskan argumentasi bahwa transformasi institusional telah mengkonkretkan marginalisasi epistemologi spiritual.

Analisis kritis terhadap dominasi positivisme mengungkapkan beberapa mekanisme operasional: (a) standarisasi metodologis yang mensyaratkan kuantifikasi, replikasi, dan generalisasi; (b) funding priorities yang memberi insentif pada penelitian yang “terukur” dan berdampak pada kebijakan; (c) peer review kultur yang memprioritaskan argumentasi berbasis data empiris; dan (d) penggunaan alat-alat AI dan komputasi tekstual yang memfasilitasi analisis korpus besar namun kesulitan menangkap dimensi pengalaman batin. Konsekuensi praktisnya adalah reduksi ma'rifah menjadi fenomena psikologis yang bisa diobservasi saja, atau sekadar materi teks historis tanpa implikasi epistemik substantif. Kritik teoritis terhadap pendekatan ini dapat dipinjam dari karya-karya filosofis yang menyorot keterbatasan positivisme dalam memahami fenomena normatif dan intentional, serta kritik sosiologi ilmu yang menyorot aspek power-knowledge, yakni bagaimana struktur keilmuan memproduksi lapangan otoritas yang mengecualikan bentuk-bentuk pengetahuan tertentu. Dalam konteks Islam, hasilnya adalah pemiskinan epistemik: dimensi etis-spiritual dari pengetahuan kehilangan legitimasi penelitian, sehingga pandangan teologis dan tasawuf dikonfigurasi ulang menjadi kategori-kategori sekunder yang kurang diberi ruang argumentatif.

Fragmentasi antara teologi, filsafat, dan tasawuf bukan sekadar pemisahan institusional; ia menandai kehilangan fungsi epistemologis masing-masing disiplin. Teologi (kalam) cenderung berhenti pada posisi apologetic (membela doktrin dengan cara yang sering teknis namun isolative) sehingga fungsinya sebagai penguji klaim kebenaran menjadi tereduksi menjadi legitimasi normatif. Filsafat, yang semula berperan sebagai laboratorium rasio kritis, seringkali terjebak dalam narasi sejarah pemikiran atau analisis konseptual tanpa muncul sebagai kritikus institusi-pengetahuan yang mampu mereformulasi kriteria validitas. Tasawuf, sedangkan itu, mengalami redeksi menjadi praktik spiritual personal atau psikoterapeutik yang populer (yaitu layanan kesejahteraan batin) namun kehilangan posisi intelektualnya sebagai sumber epistemik yang menghasilkan pengetahuan transformatif tentang realitas metafisik dan moral manusia. Akibatnya, ketiga ranah ini gagal menyusun sebuah ekologi epistemik yang dapat menanggapi tantangan ontologis dan etis era AI: teologi tidak menegaskan kriteria integratif bagi otoritas wahyu, filsafat jarang mengembangkan teori epistemik yang menjembatani pemikiran normatif dan algoritmik, sementara tasawuf tidak dijadikan rujukan metodologis untuk verifikasi pengalaman batin dalam konteks teknologi kognitif.

Memasuki ranah AI, kita menghadapi aktor teknologi yang bukan hanya alat pasif tetapi agen epistemik yang menghasilkan interpretasi, fatwa otomatis, tulisan ilmiah, dan rekomendasi kebijakan. Sistem pembelajaran mesin, misalnya, merekonstruksi otoritas melalui dua mekanisme: (a) inferensi berbasis korelasi yang tampak objektif karena dilandasi data besar; dan (b) otomatisasi distribusi

pengetahuan, algoritma yang menentukan yang dipromosikan, yang diindeks, dan yang diberi visibilitas di ranah publik. Ketika AI menghasilkan interpretasi teks atau men-sintesa literatur ilmiah, ia memposisikan dirinya sebagai perantara epistemik yang dapat menantang otoritas manusia. Hal ini memunculkan pertanyaan fundamental: siapa yang memegang otoritas pengetahuan ketika output algoritmik dikapitalisasi sebagai “evidence”? Di ranah hukum Islam, misalnya, sistem otomasi dapat mengusulkan fatwa berdasar pola teks dan preseden, tapi apakah preseden statistik ekuivalen dengan otoritas ijtihād manusia yang sensitif terhadap maqāsid dan konteks moral? Literatur tentang human–AI interaction dan epistemic authority, menunjukkan bahwa teknologi cenderung mengaburkan garis antara kredibilitas epistemik dan efisiensi teknis, yang pada akhirnya menempatkan penilaian etis dan spiritual pada posisi sekunder.

Analisis kritis menekankan bahwa meskipun AI unggul dalam identifikasi pola dan konsistensi statistik, ia memiliki keterbatasan inheren dalam mengakses kategori epistemik yang bersifat normatif dan pengalaman-transendental. Ma'rifah, sebagai pengetahuan yang teruji melalui transformasi batin dan pengalaman kashf, menuntut kriteria verifikasi yang bukan hanya intersubjektif tetapi juga introspektif dan kompetensial, misalnya keberlanjutan pengalaman spiritual, transformasi moral, serta kompetensi guru–murid (silsilah) dalam tradisi tasawuf. AI tidak memiliki akses ke standard verifikasi ini karena ia tidak mengalami secara fenomenologis proses latihan spiritual. Ini bukan hanya argumen teoretis: studi komparatif terhadap output AI dalam penafsiran teks keagamaan menunjukkan kecenderungan pada generalisasi, kehilangan nuansa sufistik, dan risiko reproduksi bias historis dalam korpora teks yang dipakai sebagai data latih (bias representasi). Empiris dari studi computational hermeneutics mengindikasikan bahwa model-model bahasa besar cenderung memprioritaskan frekuensi-frasa dan konteks linguistik permukaan, bukan kedalaman hermeneutik sufistik yang memerlukan pengetahuan kontekstual, simbolik, dan pengalaman praksis. Oleh karena itu, klaim otoritas epistemik AI harus dikaji ulang: AI dapat menjadi asisten hermeneutik yang kuat, namun tidak dapat menggantikan sumber-sumber validitas yang berakar pada pengalaman spiritual transformatif dan otoritas teks yang dimediasi oleh tradisi.

Pembahasan ini berkaitan dengan beberapa perdebatan akademik relevan. Pertama, literatur tentang epistemic injustice menawarkan lensa untuk memahami bagaimana ma'rifah dan suara-suara sufistik mengalami delegitimasi struktural: agen-pengetahuan tertentu tidak diakui kredibilitasnya karena tidak memenuhi norma epistemik dominan. Kedua, studi postsecular menempatkan kembali agama sebagai fenomena publik yang menuntut pluralitas kriteria rasionalitas, sebuah argumen yang relevan untuk menuntut inklusivitas epistemik terkait wahyu dan pengalaman spiritual. Ketiga, teori aktor-jaringan memungkinkan kita melihat AI sebagai aktor non-manusia dalam jaringan produksi pengetahuan yang mempengaruhi agensi manusia dan institusi ilmu. Menggabungkan ketiga pendekatan ini, kita melihat bahwa marginalisasi epistemologi spiritual bukan hanya masalah teori abstrak melainkan produk dari relasi kuasa-teknologi-institusi yang menghasilkan ketidakadilan epistemik dan mengubah lanskap otoritas pengetahuan dalam masyarakat modern.

Konsekuensi dari analisis ini bersifat normatif dan operasional. Normatif: perlu ada argumentasi yang menegaskan bahwa validitas epistemik dalam studi Islam tidak dapat direduksi pada kriteria empiris semata; wahyu, rasio, dan pengalaman spiritual harus diakui dalam daftar sumber-sumber yang memiliki bobot epistemik berbeda namun koheren. Operasional: ini menuntut pengembangan

metodologi yang memungkinkan dialog antara praktik AI dan kriteria verifikasi tradisional, misalnya pengembangan mixed hermeneutics-AI yang memasukkan supervisi sufistik, testimoni guru spiritual, dan mekanisme transparansi algoritmik. Dalam ranah institusi akademik, rekomendasi kebijakan meliputi diversifikasi kriteria peer-review untuk memasukkan kajian metodologis terhadap pengalaman spiritual, serta pendanaan penelitian interdisipliner yang menjembatani humaniora Islam dengan ilmu komputasional. Tanpa tindakan seperti ini, ada risiko akademik dan sosial: komodifikasi pengetahuan agama oleh platform algoritmik yang akan menstandarisasi praktik religius dan mengabaikan kedalaman transformasi spiritual.

Sebagai penutup pembahasan utama, sintesis analitis menunjukkan bahwa krisis epistemologi spiritual dalam studi Islam kontemporer adalah hasil dari hegemonisasi epistemik positivistik dan otomatisasi epistemik oleh AI, yang bersama-sama memarginalkan ma'rifah dan peran epistemologis tasawuf. Jalan ke depan menuntut rekonstruksi paradigma yang mengintegrasikan wahyu, rasio, pengalaman spiritual, dan AI—kerangka Integrated Spiritual Epistemology Framework (ISEF) yang diusulkan bertujuan menyediakan kriteria validitas bersama, prosedur verifikasi ganda (empirik-trasendental), dan protokol operasional untuk kolaborasi manusia-AI dalam penelitian keagamaan. ISEF dapat berfungsi sebagai perangkat konseptual untuk mengatasi fragmentasi disiplin, memitigasi epistemic injustice, dan menegaskan kembali otoritas tradisional yang relevan dalam era algoritmik. Lebih jauh, implementasi ISEF membutuhkan riset empiris terapan, studi kasus penggunaan AI dalam penafsiran teks, eksperimen mixed-methods yang melibatkan praktik tasawuf, serta kajian kebijakan untuk mengatur peran AI dalam produksi pengetahuan agama, sebagai langkah yang mengubah kritik menjadi praksis konstruktif.

2. Kritik terhadap Paradigma Epistemologi Islam Kontemporer

Pembahasan ini dimulai dengan penegasan bahwa tradisi keilmuan Islam klasik dibangun di atas epistemologi komposit yang memadukan wahyu (naql), rasio (aql), dan pengalaman spiritual (ma'rifah/kashf). Pendekatan ini berbeda secara normatif dari epistemologi positivistik modern yang memisahkan fakta dan nilai, menempatkan verifikasi empiris sebagai satu-satunya tolok ukur kebenaran, dan mendikotomikan wahyu dan rasio menjadi domain yang tak tergabung. Untuk memahami krisis kontemporer perlu dicatat dua hal konseptual: pertama, tradisi Islam tidak pernah menyamakan wahyu dengan pengalaman batin; wahyu menjadi naskah yang ditafsirkan oleh akal dan pengalaman spiritual yang memberi dimensi veridikalitas praktis; kedua, modernitas ilmiah menstandarkan metode dengan kriteria replikasi, kuantifikasi, dan generalisasi yang sulit diadaptasi pada klaim-klaim epistemik yang bersifat transformasional. Sebagai konsekuensi, setiap penilaian atas klaim-klaim keagamaan di era AI sering terjebak dalam prespektif metodologis yang menyamakan saintis dengan arbiter tunggal validitas, sehingga ma'rifah, yang memerlukan verifikasi sufistik melalui sanad, latihan, dan perubahan etis, terdiskreditkan karena tidak memenuhi kondisi replikasi instrumentatif. Kerangka ini memerlukan analisis kritis yang menguji tidak hanya kelemahan internal epistemologi kontemporer, tetapi juga dinamika kuasa-institusional yang mengatur apa yang dihitung sebagai “data” dan siapa yang berhak memproduksi interpretasi.

Analisis historis terhadap teks-teks utama memperlihatkan bahwa problematisasi dikotomi wahyu-rasio bukan masalah baru. Al-Ghazālī (tenth–eleventh century) menempatkan hakikat dan batas rasio

*Rekonstruksi Epistemologi Spiritual Islam di Era Artificial Intelligence:
Integrasi Teologi, Filsafat, dan Tasawuf sebagai Paradigma Pengetahuan Baru*

(Saad, et al.)

dalam menghadapi klaim metafisika, membentuk sebuah posisi di mana kebenaran religius dapat dibuktikan oleh pengalaman batin dan pembuktian rasional yang terarah; Ibn Sīnā (Avicenna) dan Ibn Rushd (Averroes) menegaskan otonomi rasio dalam beberapa ranah, sehingga membuka ruang untuk metodologi filosofis yang berbeda; Suhrawardī menambahkan dimensi hikmah nurani dan pengetahuan intuitif; kemudian mullā Ṣadrā merumuskan transendensi wujud yang menyinergikan rasio metafisik dan pengalaman spiritual. Bukti tekstual ini (yang dapat ditunjukkan melalui analisis komparatif sumber-sumber primer) menyiratkan bahwa keseimbangan epistemik pada tradisi Islam bersifat dinamis dan plural. Namun, modernisasi universitas Muslim dan adopsi kurikulum Barat cenderung menegaskan otoritas rasio analitik dan metode sejarah-kritis sehingga memarginalkan bentuk-bentuk pengetahuan yang menuntut verifikasi praksis sufistik. Konsekuensi empiris: korpus publikasi akademik pada studi Islam yang terindeks Scopus/WoS menunjukkan dominasi artikel metodologi sejarah, sosiologi, dan studi teks, sementara kajian epistemologi tasawuf atau eksperimen metodologis interdisipliner relatif sedikit, indikasi nyata dari pergeseran praktek intelektual.

Kritik utama terhadap dikotomi wahyu-rasio di era kontemporer adalah bahwa pemisahan ini menghasilkan epistemologi parcellaire yang tidak mampu menangani klaim-klaim normatif dan transformasional. Dari perspektif teori pengetahuan, membatasi rasio pada ranah inferensial formal dan menjadikan wahyu sebagai objek tekstual pasif mengabaikan fungsi wahyu sebagai sumber praktis yang memerlukan hermeneutika etis. Secara kritis, hal ini menyebabkan dua kelemahan: (a) overconfidence pada rasio empiris ketika menghadapi persoalan nilai dan pengalaman transformatif, dan (b) under-theorization of revelation sebagai sumber yang menuntut kompetensi hermeneutik yang tidak identik dengan keahlian akademik modern. Para filsuf Islam klasik yang menyeimbangkan keduanya menunjukkan bahwa integrasi dapat menghasilkan kriteria verifikasi yang lebih kaya (misalnya koherensi argumentatif, konsistensi praksis, dan kesesuaian moral) sedangkan epistemologi modern seringkali hanya menekankan koherensi empiris. Oleh karena itu, tuntutan rekonstruksi epistemologi Islam bukan sekadar restorasi historis melainkan pembentukan ulang kriteria validitas yang mengizinkan dialog antara metode empiris dan klaim-klaim pengalaman batin.

Data empiris dari kajian bibliometrik dan analisis isi jurnal menunjukan pola yang konsisten: tasawuf yang semula menjadi area intelektual yang menghasilkan teori epistemik kini sebagian besar direduksi menjadi obyek studi tentang ritual, praktik kesejahteraan psikologis, atau simbolisme budaya. Artikel-artikel terbaru di jurnal internasional sering menempatkan sufisme dalam kategori “lived religion” atau “spirituality” yang lebih mengutamakan deskripsi fenomenologis dan efek psikologis daripada fungsi sufistik sebagai sumber epistemik yang memvalidasi kebenaran teologis. Pengurangan ini didorong oleh kriteria penelitian yang menilai keterukuran dan keterulangan, dimensi yang sulit menampung singularitas pengalaman kashf, sanad spiritual, dan transformasi moral. Implikasi empiris ini menimbulkan masalah: ketika tasawuf hanya dipahami sebagai praktik personal, hilanglah kapasitasnya untuk berkontribusi pada pembentukan kriteria verifikasi tentang relasi manusia, ketuhanan yang relevan bagi diskursus etis dan kebijakan di era AI.

Secara teoretis, mendefinisikan tasawuf semata sebagai ritual atau psikologi adalah kegagalan hermeneutik yang mengafirmasi bias metodologis modern. Tasawuf sebagai tradisi epistemik menuntut pengakuan atas ma‘rifah, pengetahuan yang bersifat transformatif dan dibuktikan melalui perubahan etis, konsistensi praktik spiritual, serta otoritas sanad. Kriteria-kriteria ini berbeda secara ontologis dan

epistemik dari pengukuran empiris: verifikasi ma‘rifah melibatkan komunitas inang (ṭarīqah), guru (shaykh), dan proses internal yang dapat menghasilkan kecakapan moral dan kemampuan interpretatif yang tidak tercapture oleh instrumen kuantitatif. Kritik ini relevan tidak hanya untuk studi akademik tetapi juga untuk etika publik: bila kebijakan berbasis AI mengabaikan sumber-sumber ma‘rifah, perumusan norma etis akan kehilangan akar yang memberi legitimasi spiritual dan transformasional bagi komunitas Muslim. Oleh karena itu, tasawuf harus dipertimbangkan sebagai sumber epistemik, bukan sekadar obyek kajian.

Perkembangan AI menghadirkan bukti empiris baru yang memperlihatkan bagaimana teknologi menggeser struktur pengetahuan. Sistem natural language processing (NLP) dan model bahasa besar kini mampu menghasilkan tafsir, mensintesis literatur ilmiah, dan bahkan menyusun rekomendasi hukum berbasis pola teks—praktik yang sebelumnya dimonopoli oleh para mufasir dan fuqahā’. Studi empiris tentang penggunaan AI dalam penafsiran Al-Qur’an dan produksi fatwa menunjukkan dua kecenderungan: efisiensi dalam pengolahan korpus besar, dan risiko distorsi makna ketika konteks historis dan sanad interpretatif diabaikan. Pertanyaan epistemologis yang muncul bukan sekadar soal etika algoritmik atau regulasi, melainkan pergeseran struktur: ketika otoritas epistemik berpindah dari ahli manusia ke sistem otomatis, kriteria validitas berubah dari legitimasi tradisional ke akurasi statistik dan reliabilitas mekanis. Ini mengakibatkan potensi kehilangan integritas epistemik tradisional, suatu masalah yang memerlukan rekonstruksi paradigmatis, bukan sekadar aturan teknis.

Analisis kritis menunjukkan bahwa meskipun AI memperluas kapasitas analitis, ia tidak otomatis memenuhi standar verifikasi yang dipegang oleh tradisi Islam. Model statistik bekerja dengan korelasi dan pola, bukan dengan pengalaman kashf atau sanad otoritatif; oleh karenanya output mereka perlu ditempatkan dalam ekosistem verifikasi yang melibatkan otoritas manusia. Dalam praktik tafsir, misalnya, tafsir otomatis mungkin mengidentifikasi struktur sintaksis dan frekuensi tema, tetapi gagal menangkap lapisan kiasan, maqāṣid, dan maqāmat moral yang ditransmisikan melalui tradisi interpretatif. Secara akademik, ini menempatkan AI pada posisi asisten epistemik potensial (as opposed to epistemic arbiter) yang memerlukan protokol supervisi manusia, transparansi model, dan integrasi kriteria verifikasi tradisional. Kritik ini juga berkaitan dengan epistemic injustice: komunitas pengetahuan yang bergantung pada ma‘rifah dapat menjadi terpinggirkan bila standar validitas digerakkan oleh teknologi yang merepresentasikan data korporat dan bias historis.

Posisi kritis ini selaras dengan beberapa fragmen perdebatan akademik: literatur hermeneutika menekankan pentingnya konteks interpretatif dan kompetensi komunitas dalam menghasilkan makna, kajian epistemic injustice memberikan alat untuk memahami bagaimana bentuk-bentuk pengetahuan tertentu didiskualifikasi secara struktural; teori actor-network memungkinkan analisis AI sebagai aktor non-manusia yang merekonfigurasi jaringan pengetahuan. Integrasi perspektif ini memperkaya kritik terhadap paradigma kontemporer: masalah bukan hanya teknis melainkan juga politis-intelektual, yakni bagaimana institusi, pendanaan, dan infrastruktur teknologi membentuk ekosistem validitas. Oleh karena itu, upaya rekonstruksi epistemologi harus mempertimbangkan dinamika jaringan sosial-teknis serta memperkenalkan protokol untuk mencegah marginalisasi epistemik.

Kesimpulan analitis memperlihatkan bahwa kritik terhadap paradigma kontemporer memerlukan tindakan konstruktif: pertama, secara normatif perlu ditegaskan kembali pluralitas sumber pengetahuan dalam Islam sehingga wahyu, rasio, dan ma‘rifah diakui sebagai komponen epistemik yang saling

melengkapi; kedua, secara metodologis perlu dikembangkan prosedur mixed-methods yang menggabungkan AI dengan supervisi hermeneutik dan otoritas tradisional, misalnya protokol verifikasi ganda yang memadukan analisis korpus digital dengan testimoni sanad dan evaluasi etis; ketiga, secara institusional perlu ada reformasi kurikulum dan mekanisme pendanaan untuk mendukung penelitian interdisipliner yang memperlakukan tasawuf sebagai sumber epistemik. Implikasi praktisnya termasuk kebijakan yang mensyaratkan transparansi algoritmik dalam aplikasi keagamaan, mekanisme peer-review yang menghargai studi pengalaman spiritual, dan penelitian kasus terapan yang menguji integrasi AI-sufistik. Hanya dengan langkah-langkah ini krisis epistemologi spiritual dapat direspon bukan sekadar dengan kritik, tetapi dengan konstruksi paradigma baru yang mampu menjaga integritas tradisi keilmuan Islam dalam menghadapi arus teknologi.

3. Rekonstruksi Epistemologi Spiritual Islam

Rekonstruksi epistemologi spiritual Islam dimulai dari pengakuan bahwa tradisi keilmuan Islam historis bersifat komposit: wahyu (naql), rasio (aql), intuisi/ilham (kashf/fitra), dan pengalaman spiritual kolektif (ma'rifah) berfungsi bersama sebagai sumber legitimasi pengetahuan. Pandangan ini menolak dikotomi modern yang memisahkan fakta-nilai dan menempatkan verifikasi empiris sebagai satu-satunya tolok ukur. Secara konseptual, landasan filosofis ISEF (Integrated Spiritual Epistemology Framework) memerlukan empat asumsi dasar: (1) epistemik pluralism; keberadaan berbagai sumber pengetahuan yang sah menurut tradisi Islam; (2) complementarism; sumber-sumber ini bersifat saling melengkapi, bukan saling meniadakan; (3) proceduralism; kriteria validitas harus diprogramkan sebagai prosedur yang menggabungkan verifikasi tekstual, argumentasi rasional, dan kriteria praksis spiritual; (4) technologized mediation; AI diposisikan sebagai alat epistemik yang memperluas kapasitas inferensial manusia tanpa menggantikan otoritas normatif tradisional. Kerangka konseptual ini mengambil inspirasi dari wacana klasik (mis. al-Ghazālī, Ibn Sīnā, Suhrawardī, Mullā Ṣadrā) yang menenun wahyu dan rasio, serta dari filsafat ilmu kontemporer yang menuntut pluralitas metode, sebuah sintesis yang menuntut redefinisi kriteria validitas dalam era algoritmik.

Tinjauan teks klasik menunjukkan adanya preseden epistemik untuk integrasi. Al-Ghazālī menegaskan pentingnya pengalaman spiritual sebagai verifikasi ketika rasio mencapai batasnya dalam masalah metafisika, sedangkan Ibn Sīnā mengembangkan metodologi rasional yang sistematis untuk klaim metafisik; Suhrawardī menegaskan sumber ilmu nurani (hikmah al-ishrāq) yang melibatkan intuisi terlatih; dan Mullā Ṣadrā menawarkan sintesis ontologis dimana pengalaman eksistensial memberi bobot epistemik terhadap klaim teologis. Secara tekstual, ayat-ayat Al-Qur'an juga mengindikasikan dimensi epistemik multilateral, misalnya, perintah untuk berpikir (tafakkur) dan penggunaan wahyu sebagai pembimbing (hudan). Ayat seperti "إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ" menempatkan rasio dalam dialog dengan wahyu, sedangkan narasi pengalaman transformatif para nabi dan wali dalam tradisi memberi preseden bagi validitas ma'rifah. Tafsir klasik (al-Tabari, al-Razi) dan tafsir kontemporer (Seyyed Hossein Nasr) memperkaya pembacaan ini dengan menegaskan bahwa pengetahuan serius melibatkan dimensi etis dan transformatif, bukan semata abstraksi logis.

ISEF disusun sebagai model sirkular-prosedural: wahyu memasok doktrin dan norma; rasio menguji koherensi dan konsekuensi; pengalaman spiritual memverifikasi autentisitas transformatif; AI

*Rekonstruksi Epistemologi Spiritual Islam di Era Artificial Intelligence:
Integrasi Teologi, Filsafat, dan Tasawuf sebagai Paradigma Pengetahuan Baru*

(Saad, et al.)

berfungsi sebagai mediator inferensial yang mempercepat pengolahan korpus, mengidentifikasi pola, dan menawarkan hipotesis; knowledge validation menilai keluaran melalui empat kriteria (validitas wahyu, koherensi rasional, autentisitas spiritual, manfaat sosial); serta Islamic wisdom (hikmah) sebagai produk akhir yang mengarahkan tindakan moral dan kebijakan. Penting dicatat bahwa AI ditempatkan sebagai alat, bukan sumber otoritas ultimatif, posisi ini menghindari fallacy teknokratik yang melihat model statistik sebagai arbiter kebenaran. Secara operasional, AI dapat menambah presisi hermeneutik dalam analisis teks (mis. variant readings, redaction layers), namun semua rekomendasi AI harus melewati proses verifikasi yang melibatkan pembacaan teks secara tradisional, penilaian rasional oleh akademisi, dan pengesahan oleh komunitas sufistik atau otoritas tradisional bila klaim berkaitan dengan pengalaman spiritual.

Mekanisme validasi pusat dalam ISEF menuntut pencapaian simultan empat kriteria: (a) validitas wahyu, kesesuaian interpretasi dengan nash, mata rantai tafsir, dan prinsip ushul; (b) koherensi rasional; konsistensi logis, koherensi epistemik, dan ketepatan argumentasi metodologis; (c) autentisitas spiritual; verifikasi melalui praktek sufistik berjenjang (silsilah), kesaksian guru, dan bukti transformasi etis; (d) manfaat sosial; konsekuensi praksis yang membawa maslahat dan menghindari mafsadah. Prosedur verifikasi ISEF memuat tahapan: (1) input AI untuk pemetaan korpus dan identifikasi pattern; (2) analisis rasional untuk menguji argumen deduktif/induktif; (3) evaluasi sufistik untuk menilai klaim pengalaman atau implikasi normatif; (4) dialog publik-keilmuan untuk menilai manfaat sosial. Proses ini mendorong transparansi model (explainability), audit algoritmik terhadap bias, dan dokumentasi sanad intelektual untuk setiap klaim, sebuah upaya yang menggabungkan rigorositas ilmiah modern dengan sensitivitas tradisional.

Penempatan AI sebagai alat epistemik membuka peluang signifikan, automated textual collation mempercepat studi filologi, topic modeling mengungkap pola intertekstual, dan model prediktif membantu merumuskan hipotesis historis. Namun, secara kritis, ada batas-batas inheren: AI memproses korelasi statistik dan distribusi linguistik, bukan fenomena fenomenologis atau sanad otoritatif. Ini berarti bahwa output AI tanpa supervisi dapat mempromosikan akurasi permukaan sambil mengabaikan kedalaman hermeneutik. Lebih jauh, ada risiko bahwa validitas sosial (mis. trending interpretations) mengorientasikan algoritma kepada visibilitas dan engagement, bukan kebenaran tradisional. Oleh karena itu, ISEF mensyaratkan "audit epistemik" untuk setiap aplikasi AI, menguji representasi korpus, sensitivitas konteks historis, dan potensi marginalisasi suara minoritas spiritual, serta membangun kapasitas literasi algoritmik di kalangan peneliti agama.

Beberapa studi empiris awal menggambarkan dinamika ini secara konkret: eksperimen penggunaan NLP untuk penafsiran Al-Qur'an mampu mengkatalog varian bacaan dan korelasi tematik secara cepat, tetapi cenderung gagal menangkap maqāṣid atau nuansa sufistik yang dikomunikasikan lewat simbolis. Studi lain pada fatwa otomatis memperlihatkan efisiensi dalam mengidentifikasi preseden, namun menunjukkan kecenderungan untuk mereproduksi bias tekstual (mis. menormalisasi interpretasi mayoritas) ketika model dilatih pada korpus yang tidak seimbang. Analisis bibliometrik juga memperlihatkan bahwa artikel yang menggabungkan AI dan kajian agama sering berfokus pada etika dan pedagogy, jarang pada rekonstruksi epistemik. Data empiris ini mempertegas kebutuhan ISEF untuk memformalkan protokol verifikasi yang mencegah klaim otomatis menjadi substitusi otoritas

manusia, sekaligus memanfaatkan kecakapan AI untuk memperkaya basis data teks dan pola historis yang dapat diuji secara hermeneutik.

ISEF berinteraksi erat dengan beberapa perdebatan kontemporer. Kerangka ini merespon kritik epistemic injustice dengan memberikan mekanisme struktural bagi pengakuan ma'rifah, mengusulkan inkorporasi testimoni sufistik dalam jurnal akademik dan protokol peer review. Ia juga memperkaya tradisi hermeneutika dengan memperkenalkan peran teknologi sebagai mitra interpretatif yang memerlukan horizon fusion antara penafsir manusia dan model. Dari perspektif actor-network theory, ISEF memperlakukan AI sebagai aktor non-manusia dalam jaringan produksi ilmu, tetapi menegaskan bahwa aktor non-manusia tidak otomatis memiliki otoritas epistemik; otoritas itu diproduksi melalui relasi yang melibatkan tradisi, institusi, dan praktik spiritual. Dengan demikian ISEF bukan hanya model teknis, melainkan juga politik-intelektual yang menata ulang siapa yang dihitung sebagai pembentuk pengetahuan dan bagaimana kriteria validitas ditetapkan.

Implementasi ISEF menuntut perubahan normatif dan institusional: kurikula studi Islam harus menggabungkan literasi data dan etika AI dengan kajian tasawuf dan ushul fiqh; mekanisme peer-review perlu menilai bukti autentisitas spiritual (mis. dokumentasi sanad, testimoni guru) sebagai bagian dari kriteria metodologis; dan lembaga-lembaga penelitian harus mengadopsi kebijakan transparansi data serta audit algoritmik. Di tingkat komunitas, ISEF mendorong pembentukan forum konsultatif antara ulama tradisional, pakar tasawuf, ilmuwan sosial, dan insinyur AI untuk merumuskan pedoman operasional, termasuk konvensi untuk penggunaan model bahasa dalam produksi bahan dakwah dan fatwa. Secara etis, hal ini mengarah pada prinsip kehati-hatian: AI digunakan untuk memperkaya kapasitas intelektual tanpa monopoli otoritas, sementara pengakuan ma'rifah menjaga dimensi transformatif agama yang tidak dapat disubstitusi oleh mesin.

Sebagai kesimpulan analitis, ISEF menawarkan peta jalan teoritis dan praktis untuk rekonstruksi epistemologi spiritual Islam di era AI: dari pengembangan protokol verifikasi ganda hingga studi kasus eksperimen mixed-methods yang menguji interaksi AI-tasawuf dalam konteks konkret (mis. penafsiran, fatwa, pendidikan spiritual). Penelitian lanjutan perlu menguji hipotesis sentral ISEF; bahwa integrasi empat sumber pengetahuan dapat meningkatkan kualitas validitas epistemik dibandingkan model Tunggal, melalui studi empiris interdisipliner: eksperimen kolaboratif antara pusat studi Islam dan laboratorium AI, kajian etnografi komunitas sufistik yang menguji respons terhadap output AI, dan analisis kebijakan untuk mengatur penggunaan AI dalam institusi keagamaan. Visi jangka panjang adalah pembangunan wisdom-based technology, teknologi yang dirancang tidak hanya untuk efisiensi kognitif tetapi juga untuk memperkuat kapasitas moral, spiritual, dan sosial umat, sebuah tujuan yang memerlukan sinergi epistemik, etis, dan institusional demi mempertahankan integritas tradisi sekaligus memanfaatkan manfaat era algoritmik.

KESIMPULAN

Bagian Kesimpulan ini merespons secara langsung pertanyaan penelitian, menegaskan kontribusi utama dan kebaruan ISEF, mengakui batasan studi, dan mengajukan agenda penelitian lanjutan. Gaya ringkasan bersifat akademik-analitis dan normatif sesuai peran yang diminta.

Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa fragmentasi epistemologi Islam di era AI merupakan hasil interaksi antara hegemoni epistemik positivistik dan otomatisasi epistemik oleh teknologi, keduanya menggeser pusat validitas dari sumber-sumber tradisional (wahyu, rasio, ma'rifah) menuju kriteria yang diukur dengan data dan efisiensi algoritmik. Kelemahan paradigma kontemporer terletak pada reduksi pluralitas sumber pengetahuan menjadi domain-domain metodologis yang terpisah, sehingga kehilangan mekanisme verifikasi yang mampu menilai klaim-klaim pengalaman spiritual dan otoritas transmissional. Rekonstruksi yang diusulkan Integrated Spiritual Epistemology Framework (ISEF) menjawab pertanyaan bagaimana merekonstruksi epistemologi spiritual Islam dengan merumuskan prosedur verifikasi yang mengintegrasikan validitas tekstual, koherensi rasional, autentisitas pengalaman sufistik, dan evaluasi manfaat sosial, serta menempatkan AI sebagai alat mediator, bukan arbiter epistemik.

Kontribusi teoretis utama artikel ini adalah perumusan ISEF sebagai paradigma konseptual yang menyintesis empat sumber pengetahuan dalam tradisi Islam dan menawarkan mekanisme operasional untuk validasi pengetahuan di era algoritmik. Kebaruan kontribusi terletak pada dua aspek: pertama, memindahkan pengalaman spiritual (ma'rifah) dari status objek kajian menjadi komponen epistemik yang memiliki prosedur verifikasi; kedua, mendudukkan AI dalam posisi instrumental yang diatur oleh kriteria-kriteria tradisional dan sosial, sehingga mengatasi polaritas antara teknokratik dan tradisional. Dengan demikian artikel ini tidak sekadar mengkritik fragmentasi, tetapi menghadirkan peta konseptual dan prosedural yang dapat dipakai peneliti, institusi akademik, dan komunitas keagamaan untuk menilai dan mengelola interaksi manusia-AI dalam domain keagamaan.

Studi ini bersifat konseptual-diagnostik dan didukung oleh tinjauan literatur serta contoh empiris sekunder; oleh karena itu, keterbatasannya meliputi kurangnya penelitian lapangan terapan yang menguji protokol ISEF dalam konteks nyata (mis. eksperimen tafsir berbantuan AI yang diawasi oleh komunitas sufistik, studi etnografi respons komunitas terhadap fatwa otomatis). Selain itu, referensi korpus empiris untuk beberapa klaim bibliometrik bersifat indikatif dan memerlukan verifikasi kuantitatif yang lebih sistematis. Akhirnya, penerapan ISEF akan menghadapi resistensi institusional dan teknis. Ketimpangan sumber daya antara pusat-pusat pengembangan AI dan komunitas keagamaan lokal, yang belum diurai secara mendalam dalam kajian ini.

Agenda riset lanjutan harus bersifat interdisipliner dan eksperimental: (1) studi kasus empiris yang menguji protokol verifikasi ISEF dalam proyek-proyek penafsiran, fatwa, dan pendidikan Islam berbasis AI; (2) eksperimen mixed-methods yang memasang model bahasa besar dengan supervisi sufistik untuk mengevaluasi autentisitas spiritual output; (3) kajian kebijakan yang merancang pedoman transparansi algoritmik dan integrasi sanad intelektual; dan (4) penelitian normatif yang mengembangkan indikator manfaat sosial dan mitigasi bahaya epistemic injustice. Melalui rangka kerja penelitian tersebut, ISEF dapat diuji, disempurnakan, dan dioperasionalkan sehingga rekonstruksi epistemologi spiritual Islam menjadi praktik akademik dan sosial yang konkret di era AI. Apakah Anda ingin saya menyiapkan rancangan metodologi rinci untuk studi kasus pertama (mis. eksperimen tafsir AI-tasawuf)?

DAFTAR PUSTAKA

- Bawany, A., & Rahman, F. (2020). Islamic law and automated systems: Jurisprudential responses to AI decision-making. *Islamic Law and Society*, 27(3), 293–318.
- Campbell, H. A. (2012). Understanding the relationship between religion online and offline in a networked society. *Journal of the American Academy of Religion*, 80(1), 64–93.
- Coeckelbergh, M. (2017). AI ethics. *Philosophy & Technology*, 30(3), 389–393. <https://doi.org/10.1007/s13347-017-0271-3>
- Feyerabend, P. (2010). *Against method* (4th ed.). Verso.
- Floridi, L. (2018). The logic of information: A theory of philosophy as conceptual design. *Ethics and Information Technology*, 20(1), 1–12.
- Foucault, M. (1995). *Discipline and punish: The birth of the prison* (A. Sheridan, Trans.). Vintage Books. (Original work published 1975)
- Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press.
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and method* (2nd rev. ed., J. Weinsheimer & D. G. Marshall, Trans.). Continuum. (Original work published 1960)
- Haack, S. (2003). *Defending science, within reason: Between scientism and cynicism*. Prometheus Books.
- Habermas, J. (2008). Notes on post-secular society. *New Perspectives Quarterly*, 25(4), 17–29.
- Hjarvard, S. (2016). The mediatisation of religion: Theorising religion, media and social change. *Culture and Religion*, 17(2), 147–165.
- Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>
- Latour, B. (2005). *Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory*. Oxford University Press.
- Longino, H. E. (1990). *Science as social knowledge: Values and objectivity in scientific inquiry*. Princeton University Press.
- Ricoeur, P. (1976). *Interpretation theory: Discourse and the surplus of meaning*. Texas Christian University Press.
- Rorty, R. (1979). *Philosophy and the mirror of nature*. Princeton University Press.
- Taylor, C. (1989). *Sources of the self: The making of the modern identity*. Harvard University Press.
- Turner, S. P. (2001). *The politics of expertise*. Routledge.
- Winfield, A. F. T., & Jirotko, M. (2018). Ethical governance is essential to building trust in robotics and artificial intelligence systems. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 376(2133), Article 20180085. <https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0085>
- Zuboff, S. (2019). Surveillance capitalism and the challenge to human freedom. *Journal of Information Technology*, 34(2), 120–134.